

Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Dukungan Legislatif, Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pada Provinsi Riau dengan Ketersediaan Anggaran sebagai Variabel Intervening

GUSLIDIAWATI¹, NASRIZAL², RASULI³

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

E-mail : guslidiawati31@gmail.com

Abstract: The purpose of this study was to examine and analyze the effect of top management support, legislative support, human resources (HR), on the implementation of the planning information system in the Riau Province government with budget availability as an intervening variable. This research is a descriptive study using a quantitative approach. The population of this study were all regional apparatus organizations (OPD) in Pekanbaru City. Respondents of this research are the planning function in each regional apparatus in OPD in Pekanbaru City. Based on the saturated sampling approach, a sample of 144 respondents was obtained. The data were then analyzed using SmartPLS version 3.2.1.m3. The results of this study are proven that top management support, legislative support and human resources (HR) have a significant effect on the implementation of planning information systems through the availability of budgets as an intervention to the Riau provincial government.

Keywords: *Top Management, Legislative, Human Resources, Planning Information Systems*

Penyusunan Perencanaan Pembangunan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap aparat Pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dan tugas serta fungsinya. Dan penerapan ini juga menimbulkan beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31, yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Data/ informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta bahan penentu/ perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Dengan adanya perkembangan dunia teknologi informasi, saat ini pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi agar

dapat memberikan data/informasi pembangunan Pemerintahan Daerah. Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan informasi secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pemerintah. Kemajuan teknologi informasi sangat diperlukan dan dapat dimanfaatkan dalam segala bidang. Salah satunya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan perencanaan yang ideal, maka di era otonomi daerah ini diwujudkanlah pemerintahan yang dikenal dengan *good government* atau yang disebut dengan *e-government*.

Di Indonesia *E-government* muncul sejak tahun 2001 melalui instruksi presiden No 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika) yang menyatakan bahwa

aparatur pemerintah harus menggunakan teknologi untuk mendukung *good government* dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian dikeluarkannya intruksi presiden RI No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* yang merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui *electronic government* itu sendiri.

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 391 tentang pemerintahan daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah (informasi pembangunan dan keuangan daerah) yang dikelola dalam suatu sistem informasi. Dengan adanya Undang-Undang No 23 tahun 2014, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah yakni Pemendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah yang terdapat pada Pasal 14 ayat (3) tentang Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis sistem informasi perencanaan.

Sistem Informasi Perencanaan adalah alat pengaturan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Kabupaten/ Provinsi menjadi selesai dengan mudah, cepat, akurat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Peraturan dengan keberadaan alat *e-planning*, Pengembangan Regional (Xiao, 2018 dan Zagonari, 2018). Perencanaan dapat memaksimalkan sistem dan sistem ini juga mampu menghadirkan analisis yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan (Ebrahimi, 2018

dan Okamuro & Nishimura, 2018) Upaya untuk meningkatkan proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis kinerja.

Pemerintah Provinsi Riau telah menerapkan sistem informasi perencanaan melalui *e-planning* pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Rencana Kerja Pemerintah Daerah Secara Online (*e-Planning*) Provinsi Riau. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: 1) memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan sistem *e-planning* bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah, 2) menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah, 3) mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik, dan 4) mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan berkelas secara konsisten.

Penerapan *e-planning* ini tidak berlangsung lama, seiring dengan besarnya tuntutan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, *e-planning* melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2017 bertransformasi menjadi sistem perencanaan pembangunan yang dikenal dengan RKPD *Online*. RKPD *online* merupakan sebuah sistem informasi hasil dari pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang selama ini berada pada wilayah penganggaran, namun telah dikembangkan sampai pada tatanan perencanaan.

Dinamisasi penerapan *e-planning* tidak hanya sampai disitu, Untuk penyusunan RKPD 2021 Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Riau telah mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan yang diberi nama *Integrated Planning (I-Planning)*, namun belum sampai *i-planning* diimplementasikan untuk menyelesaikan RKPD 2021, Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah untuk menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Pusdatin Kementerian Dalam Negeri.

Sangat dinamisnya *platform* aplikasi sistem informasi yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan tentu sangat membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan perencanaan pembangunan itu sendiri, baik dari kalangan eksekutif yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan jajarannya maupun dari kalangan legislatif. Jajaran Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya termasuk dalam proses perencanaan, organisasi perangkat daerah memiliki struktur organisasi yang dikepalai oleh seorang Kepala Perangkat Daerah yang dibantu oleh segenap Sumber Daya Manusia Aparatur perangkat daerah tersebut. Sedangkan legislatif terdiri dari pimpinan dan anggota legislatif yang menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah baik RPJPD, RPJMD dan RKPD, perangkat daerah mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan sistem informasi Pemerintah Daerah. Hal ini tentu saja memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah yang meliputi Kepala perangkat daerah dan Sumber Daya Manusia. Demikian juga

dalam proses politis perencanaan pembangunan daerah, peran dan dukungan legislatif sangat diperlukan. Fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif terlihat pada pembahasan dokumen perencanaan jangka panjang dan dokumen perencanaan jangka menengah. Sedangkan untuk dokumen perencanaan tahunan, legislatif berfungsi dalam memberikan saran dan masukan melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD ini juga harus dimasukkan ke dalam sistem informasi.

O'Brien (2009:138) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kesuksesan atau kegagalan penerapan sistem informasi dalam suatu organisasi antara lain: dukungan manajemen eksekutif/ manajemen puncak, keterlibatan *end user* (sumber daya manusia), kejelasan penggunaan kebutuhan organisasi, kematangan perencanaan dan harapan organisasi yang nyata. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sistem informasi antara lain: kurangnya input dari *end user*, tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan dan spesifikasi, pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang senantiasa berubah-ubah, kurangnya dukungan manajemen eksekutif serta inkompetensi secara teknologi.

Implementasi Sistem Informasi Perencanaan

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Salah satu instrumen perencanaan adalah sistem informasi yang tentunya dewasa ini telah berbasis elektronik terkait akan kebutuhan, tuntutan semakin tinggi terhadap keselarasan dokumen perencanaan (output) yang menampilkan tingkat kinerja organisasi terkait apakah berhasil atau gagal dalam pelaksanaannya. Sistem Informasi merupakan penggabungan 2 kata yang terdiri dari sistem dan informasi. Secara etimologi, sistem berasal dari kata *systema* (bahasa latin) dan *sustema* (bahasa Yunani) yang mempunyai arti sebuah satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan secara bersamaan supaya informasi atau materi dapat mengalir dengan mudah dan tanpa hambatan hingga mencapai tujuan. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005:55)

Perencanaan merupakan pembawaan hakiki yang selalu ada dan dilakukan oleh setiap individual ataupun organisasi baik secara sadar maupun tidak, oleh karenanya kata-kata perencanaan terdengar sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Handoko (2003:77) mengatakan bahwa perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan apa yang dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Sedangkan

Tarigan (2012:5) mendefinisikan perencanaan sebagai proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif pengguna sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Menurut Permendagri No, 86 tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku pemerintahan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Beranjak dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasannya implementasi sistem informasi perencanaan merupakan pelaksanaan sebuah sistem yang ada pada sebuah organisasi dimana didalamnya terdapat kombinasi yang terdiri dari kumpulan orang, fasilitas, teknologi bahkan cara kerja atau metode sehingga menciptakan alur komunikasi dan data serta memproses beragam tipe kejadian internal maupun eksternal yang dapat dijadikan sebagai sebuah dasar dalam penentuan keputusan berdasarkan data informasi yang terdapat dalam sistem tersebut.

Sistem Informasi Perencanaan adalah alat pengaturan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Kabupaten / Provinsi menjadi selesai dengan mudah, cepat, akurat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Peraturan dengan keberadaan alat e-planning, Pengembangan Regional (Xiao, 2018 dan Zagonari, 2018). Perencanaan dapat memaksimalkan sistem dan sistem ini juga mampu menghadirkan analisis yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan (Ebrahimi, 2018 dan Okamuro & Nishimura, 2018) Upaya untuk meningkatkan proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis kinerja.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem informasi perencanaan adalah pelaksanaan pengaturan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Kabupaten / Provinsi menggunakan sistem informasi perencanaan e-planning

Dukungan Manajemen Puncak

Manajemen tertinggi atau sering disebut pula manajemen puncak (top management) atau eksekutif kunci, misalnya dewan direktur, direktur utama, presiden direktur, dan para pejabat eksekutif lainnya. Manajemen puncak bertugas mengembangkan rencana-rencana yang luas dan melakukan pengambilan keputusan strategis.

Menurut Malayu (2011:45) definisi manajemen puncak adalah "Manajemen puncak adalah pimpinan tertinggi dari suatu perusahaan yang termasuk dalam golongan ini adalah direktur utama (Dirut), dan dewan komisaris (*board of director*). Corak kegiatan manajemen puncak adalah memimpin organisasi, menentukan tujuan dan kebijakan pokok (*basic policy*)."

Menurut Lee dan Kim (1992) Dukungan Manajemen puncak memiliki dimensi dan indikator sebagai berikut:

1. Pemahaman manajemen puncak terhadap sistem komputer
 - Kemampuan manajer menggunakan komputer
2. Tingkat minat, dukungan dan pengetahuan tentang sistem informasi
 - Perhatian terhadap kinerja sistem informasi
 - Rating pemakaian sistem informasi dari departemen pemakai.

Dukungan Legislatif

Menurut kamus bahasa Indonesia dukungan berarti suatu upaya yang diberikan kepada seseorang baik itu moril maupun material untuk memotivasi orang lain dalam melaksanakan suatu. Sedangkan lembaga legislatif adalah lembaga negara

yang berwenang membuat undang-undang dalam hal ini yang dimaksud lembaga legislatif adalah DPRD Provinsi Riau.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan legislatif adalah upaya pihak DPRD Provinsi Riau untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi perencanaan menggunakan e-planning. Sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD Provinsi mempunyai fungsi : a) Pembentukan Perda Provinsi, b) Anggaran, dan c) Pengawasan

Dari ketiga fungsi diatas, fungsi yang berkenaan dengan perencanaan adalah fungsi penganggaran. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur. Ketersediaan anggaran untuk operasional maupun peningkatan aplikasi *e-planning* menjadi bagian dalam APBD. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara : a) Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan RKPD, b) Membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi, c) Membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD Provinsi, dan d) Membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, salah satu pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah dengan pendekatan politis yaitu legislatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah berperan dalam pembahasan perencanaan pembangunan daerah baik RKPD, RPJMD maupun RPJPD. Dimensi dan indikator dukungan legislatif diambil dari fungsi DPRD sebagaimana Pasal 96 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terkait dengan proses perencanaan yaitu fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka persaingan ini organisasi atau perusahaan harus memiliki sumber daya yang tangguh. Sumber daya dibutuhkan perusahaan atau organisasi tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Peran sumber daya manusia sangat menentukan. Sumber daya manusia yaitu terjemahan dari “*human resources*”, namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan “*manpower*” (tenaga kerja). Sebagian orang menyetarakan pengertian sumber daya manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya). Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa).

Manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan/ organisasi, definisi menurut Nawawi (Iznillah, 2015:6) sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan). Menurut Werther dan Davis (Sutrisno, 2012: 4) sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai ukuran-ukuran untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang diadaptasi dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan dari Sedarmayanti (2009:53) adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan fisik (kesehatan)
2. Kemampuan non fisik, yang meliputi
 - a. Kemampuan Intelektual (kecerdasan)
 - b. Kemampuan Psikologis (mental)

Menurut Sani (2013) Sumber Manusia yang terlibat dalam kajian ini meliputi seluruh perencanaan di Bappeda beserta para operator yang ditunjuk untuk

menginput perencanaan pembangunan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Melihat uraian diatas tersebut, maka sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan dalam suatu organisasi, karena dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik berkemampuan dalam perencanaan pembangunan serta kemampuan sangat mempengaruhi maju mundurnya suatu organisasi

Ketersediaan Anggaran

Sebagaimana pendapat Kaho (1997:60) bahwa salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan sangat menentukan penyelenggaraan otonomi daerah, selain sumber daya manusia dan kemampuan aparatur adalah keuangan yang stabil dan peralatan yang lengkap.

Dalam hal ini pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi meliputi sumber daya finansial, fisik, SDM, dan kemampuan teknologis dan sistem (Simamora, 2004). Karena sumber-sumber yang dimiliki perusahaan bersifat terbatas, sehingga organisasi atau perusahaan dituntut mampu memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Dari keterangan itu, maka faktor ketersediaan anggaran (*Financial*) menjadi suatu hal yang penting dalam implementasi sistem informasi untuk meningkatkan kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan dan meningkatkan profesionalisme hasil kerja.

Anggaran pada sektor publik memiliki fungsi yang sama dengan anggaran pada perusahaan komersil, yaitu sebagai pernyataan mengenai rencana kerja yang akan dilakukan pada periode waktu tertentu. Anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2009:12), merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam

satuan moneter. Anggaran publik secara singkat merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja)
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan)

Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik. Anggaran sektor publik menjadi kendali dan tolok ukur untuk setiap aktivitas yang dilakukan.

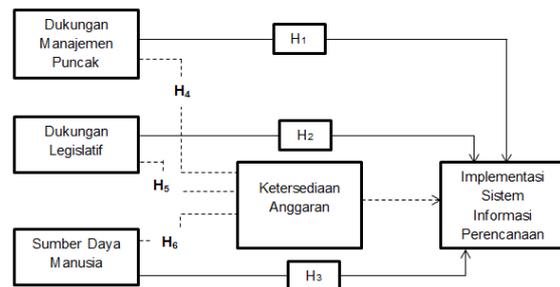
Tujuan anggaran yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses untuk menentukan jumlah alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran dimulai pada perencanaan strategis karena berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat. Anggaran sektor publik juga harus merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta dapat menentukan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahsun et al., 2009).

Ketersediaan anggaran merupakan kondisi dimana persepsi individu masing-masing pejabat struktural pusat bertanggungjawab bahwa sumber-sumber yang dianggarkan untuk masing-masing unit organisasinya yang mencukupi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuannya (Nouri dan Perker, 1998).

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan maka sebagai dasar merumuskan hipotesis, disajikan kerangka

pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner terkait variabel penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada OPD yang berada di Provinsi Riau.

Populasi penelitian adalah organisasi perangkat daerah (OPD) pada instansi pemerintah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang ruang lingkup kerjanya berada di bidang perencanaan. Jadi jumlah responden dalam penelitian ini adalah 144 orang.

Independen variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dukungan manajemen puncak, dukungan legislatif, dan sumberdaya manusia. Variabel intervensi adalah anggaran ketersediaan. Variabel terikat digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi sistem informasi perencanaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM Metode Analisis (Structural Equation Model) dengan Partial Pengukuran Least Square (PLS). Persamaan Struktural Model (SEM) model adalah teknik statistik yang memungkinkan pengujian rangkaian kompleks relatif secara simultan dan parsial. Sedangkan pengukuran PLS dapat digunakan pada

masing-masing jenis skala data (nominal, ordinal, interval, rasio) juga sebagai istilah asumsi yang lebih fleksibel. PLS juga terbiasa mengukur hubungan setiap indikator dengan konstruksinya. Selain itu, pengujian bootstrap terhadap model struktural (model luar dan model dalam) dilakukan di PLS.

Pengujian hipotesis disajikan berdasarkan penelitian tujuan. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, demikian pula tingkat tersebut batas presisi atau ketidaktepatan adalah $(\alpha) = 5\% = 0,05$. Oleh karena itu t-tabel yang dihasilkan adalah 1.96 sehingga:

- Jika t hitung lebih besar dari 1,96 maka H_0 diterima;
- Jika t hitung lebih kecil dari 1,96 maka H_0 ditolak

HASIL

Loading Factor

Hasil uji ini diukur berdasarkan besar nilai *loading factor* (*outer loading*) dari indikator konstruk. Ukuran reflektiv individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,50 dianggap cukup (Chin, 1998). Berikut hasil pengujian *convergent validity* disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. *Loading Factor*

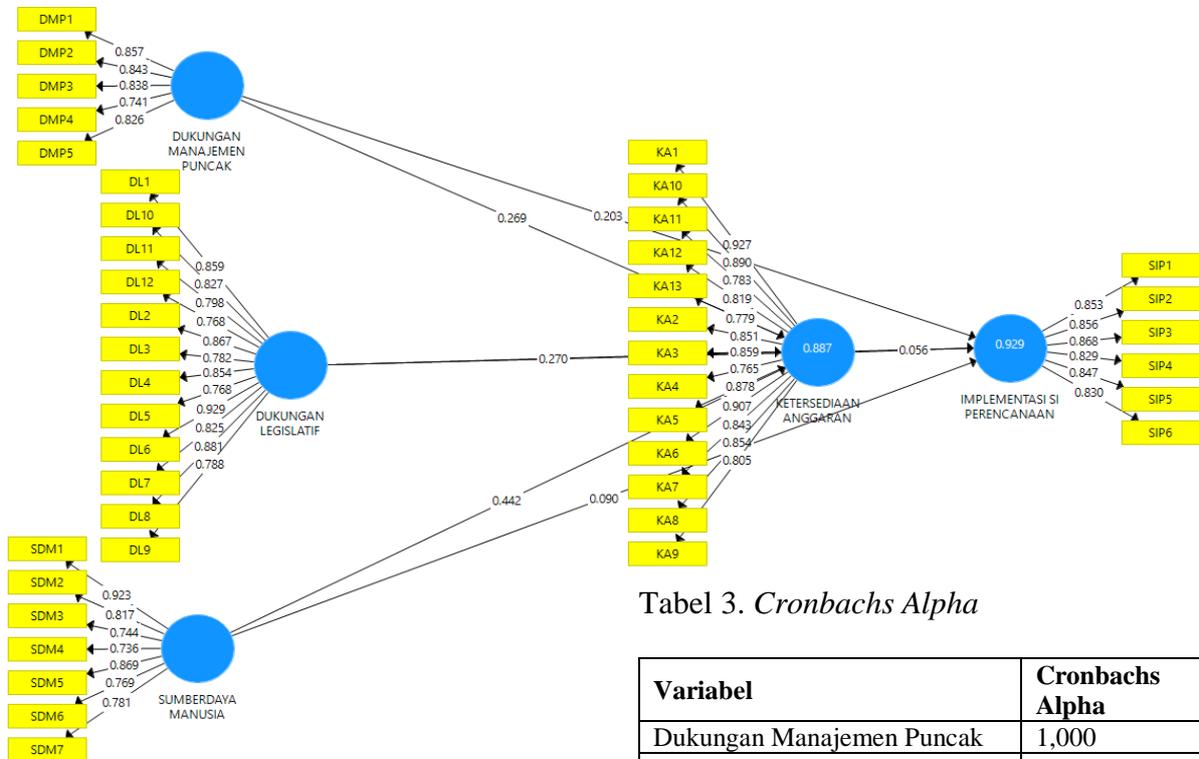
	Implementasi SI Perencanaan	Dukungan Manajemen Puncak	Dukungan Legislatif	Sumber Daya Manusia	Ketersediaan Anggaran
SIP 1	0,853				
SIP 2	0,856				
SIP 3	0,868				
SIP 4	0,829				
SIP 5	0,847				
SIP 6	0,830				
DM P1		0,857			
DM P2		0,844			
DM P3		0,838			
DM		0,741			

	Implementasi SI Perencanaan	Dukungan Manajemen Puncak	Dukungan Legislatif	Sumber Daya Manusia	Ketersediaan Anggaran
P4					
DM P5		0,826			
DL1			0,859		
DL2			0,867		
DL3			0,782		
DL4			0,854		
DL5			0,768		
DL6			0,929		
DL7			0,825		
DL8			0,881		
DL9			0,788		
DL10			0,827		
DL11			0,798		
DL12			0,768		
SD M1				0,923	
SD M2				0,817	
SD M3				0,744	
SD M4				0,736	
SD M5				0,869	
SD M6				0,769	
SD M7				0,781	
KA 1					0,927
KA 2					0,851
KA 3					0,859
KA 4					0,765
KA 5					0,878
KA 6					0,907
KA 7					0,843
KA 8					0,854
KA 9					0,805
KA 10					0,890
KA 11					0,783
KA 12					0,819
KA 13					0,779

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 3.0 (2020)

Dari tabel 1 menunjukkan seluruh *outer loading/ loading factor* memiliki nilai lebih besar dari 0,70, sehingga pengukuran ini dapat disimpulkan telah memenuhi

persyaratan validitas konvergen. Diikuti oleh diagram loading factor setiap indicator penelitian seperti dalam gambar 2 berikut:



Tabel 3. Cronbachs Alpha

Variabel	Cronbachs Alpha
Dukungan Manajemen Puncak	1,000
Dukungan Legislatif	0,945
Sumber Daya Manusia	0,897
Ketersediaan Anggaran	0,962
Implementasi Sistem Informasi Perencanaan	1,000

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 3.0 (2020)

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3 terlihat bahwa komposit nilai reliabilitas untuk semua eksogen dan endogen semua konstruksi sangat andal karena berada di atas 0.70.

Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria outer model, pengujian model terstruktur (*inner model*) dilakukan. Inner model digunakan untuk melihat hubungan antara konstruk dan nilai signifikansi serta R-Square nilai. Berikut ini adalah nilai R-Square dalam konstruksinya pada Tabel 4 sebagai berikut:

Gambar 2 Hasil Analisis *Algorithm Loading Factor*

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 3.0 (2020)

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat indikator-indikator itu mengukur nilai konstruk yang tidak boleh di bawah 0,50. Uji reliabilitas dilihat dari nilai komposit keandalan dan Cronbach alpha. Dari data yang diolah, hasil yang diperoleh pada Tabel 2 dan Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2. *Composite Reliability*

	Composite Reliability
Dukungan Manajemen Puncak	1,000
Dukungan Legislatif	0,957
Sumber Daya Manusia	0,928
Ketersediaan Anggaran	0,968
Implementasi Sistem Informasi Perencanaan	1,000

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 3.0 (2020)

Tabel 4 Koefisien Determinansi (R^2)

	R Square	R Square Adjusted
Implementasi Sistem Informasi Perencanaan	0,929	0,925
Ketersediaan Anggaran	0,887	0,881

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 3.0 (2020)

Dari tabel 4 diatas dapat diperoleh nilai R Square implementasi sistem informasi perencanaan sebesar 0,929. Artinya adalah sebesar 92,9% variabel implementasi sistem informasi perencanaan dipengaruhi oleh dukungan manajemen puncak, dukungan legislatif dan sumber daya manusia. Sedangkan R Square ketersediaan anggaran sebesar 0,881. Artinya adalah sebesar 88,1% variabel implementasi sistem informasi perencanaan melalui ketersediaan anggaran dipengaruhi oleh dukungan manajemen puncak, dukungan legislatif dan sumber daya manusia.

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis terdapat pada tabel 5 di bawah:

Tabel 5 Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Partial Least Square

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	t Statistics (O/STD EV)	P Values
Dukungan Manajemen Puncak -> Implementasi SI Perencanaan	0,333	0,326	0,161	2,072	0,039
Dukungan Legislatif -> Implementasi SI Perencanaan	0,203	0,210	0,197	1,421	0,156
Sumberdaya Manusia -> Implementasi SI Perencanaan	0,178	0,176	0,082	2,243	0,025

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STD EV)	t Statistics (O/STD EV)	P Values
Implementasi SI Perencanaan					
Dukungan Manajemen Puncak -> Ketersediaan Anggaran -> Implementasi SI Perencanaan	0,323	0,345	0,128	2,527	0,012
Dukungan Legislatif -> Ketersediaan Anggaran -> Implementasi SI Perencanaan	0,295	0,302	0,158	2,660	0,008
Sumberdaya Manusia -> Ketersediaan Anggaran -> Implementasi SI Perencanaan	0,268	0,269	0,131	5,231	0,000

Sumber: Hasil pengolahan data SmartPLS 3.0 (2020)

Berdasarkan tabel 5 terlihat hasil pengujian menunjukkan bahwa dukungan manajemen puncak berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan dengan nilai t-statistik 2,072 dan P value 0,039 (t hitung lebih besar dari 1,96), dukungan legislatif tidak berpengaruh terhadap implementasi sistem informasi perencanaan dengan nilai t-statistik 1,421 dan P value 0,156 (t hitung lebih kecil dari 1,96), dan sumber daya

manusia berpengaruh signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan dengan nilai t-statistik 2,243 dan P value 0,025 (t hitung lebih besar dari 1,96).

Untuk hubungan tidak langsung diperoleh hasil pengujian yang menunjukkan bahwa dukungan manajemen puncak (t-statistik 2,527 dan P value 0,012), dukungan legislatif (t-statistik 2,660 dan P value 0,008), dan sumberdaya manusia (nilai t-statistik 5,231 dan P value 0,000) secara tidak langsung melalui ketersediaan anggaran sebagai variabel intervening berpengaruh signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan dengan (t hitung lebih besar dari 1,96).

PEMBAHASAN

Berikut ini hasil penelitian dan penjelasan mengenai variabel-variabel tersebut.

Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan

Dukungan dan keterlibatan manajemen puncak memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi sistem informasi akuntansi. Dukungan manajemen puncak tidak hanya penting untuk alokasi sumber daya yang diperlukan, melainkan memberikan sinyal yang kuat bagi karyawan bahwa perubahan yang dilakukan merupakan suatu yang penting. Manajemen puncak juga memiliki kekuatan dan pengaruh untuk mensosialisasikan pengembangan sistem informasi yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan akan berpengaruh pula pada kepuasan pengguna.

Keberhasilan suatu organisasi tidak akan terlepas dari dukungan manajemen puncak organisasi tersebut. Dukungan manajemen merupakan keterlibatan manajemen dalam mempertahankan perilaku dan pencapaian tujuan organisasi (Cooper, 2006). Tingkat dukungan yang diberikan oleh manajemen puncak bagi sistem informasi organisasi dapat menjadi suatu

faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan semua kegiatan yang berkaitan dengan sistem Informasi. Dapat kita simpulkan bahwa semakin baik dukungan manajemen puncak yang diberikan pada suatu SKPD, maka semakin baik jalannya implementasi SIMDA. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dunuk Setiawati (2015), yang meneliti tentang analisis faktor pendukung implementasi SIMDA dan kualitas laporan keuangan di Labuhan Batu. Hasil penelitiannya menunjukkan dukungan manajemen puncak berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi SIMDA. Agar program yang digunakan atau yang akan digunakan berhasil, dibutuhkan dukungan pimpinan atau atasan. Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dari pimpinan dalam memberikan respon terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan adalah cara yang paling efektif untuk mencapai kesuksesan program tersebut.

Pengaruh Dukungan Legislatif Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan

Sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD Provinsi sebagai legislatif mempunyai fungsi: a) Pembentukan Perda Provinsi, b) Anggaran, dan c) Pengawasan. Legislatif tidak berhubungan langsung dengan implementasi sistem informasi perencanaan yang ada karena fungsi legislatif terkait sistem informasi perencanaan bukanlah sebagai pelaksana.

Dukungan politis yang kuat dan konsisten dari legislatif sangat penting dalam memulai penerapan sistem informasi perencanaan pada pemerintah daerah. Legislator terlibat dalam menetapkan tujuan, membangun indikator kinerja, memantau proses, dan mengevaluasi hasil. Implementasi sistem informasi perencanaan tidak mungkin berhasil jika pihak eksekutif dan legislatif berbeda pendapat mengenai pentingnya implementasi sistem informasi

perencanaan dan manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi sistem informasi perencanaan tersebut.

Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan

Sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam penerapan suatu sistem. Perlu untuk lebih meningkatkan kompetensi yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi, agar dapat dinilai sebagai wujud dari hasil pelaksanaan tugas yang memberi dampak secara langsung terhadap pengalaman (Parulian dan Nurianna, 2008).

Diterimanya hipotesis penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. Seperti penjelasan dalam bab sebelumnya, suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Desi Indriasari, 2010).

Kompetensi seseorang akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pernyataan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh pegawai sesuai dengan tugas yang diembannya akan selalu mendorong pegawai tersebut untuk bekerja dengan efektif, efisien dan produktif. Hal ini penting karena dalam melaksanakan visi dan misi organisasi, maka harus dikelola dan diurus oleh manusia yang memiliki kompetensi seperti aspek-aspek penting pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Dengan adanya sumberdaya manusia yang kompeten seperti memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang baik dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsi maka diharapkan kinerja implementasi sistem informasi perencanaan akan semakin baik dan berjalan dengan efektif. Hasil pengujian ini memiliki arti bahwa sumber daya memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem informasi perencanaan pada pemerintah Provinsi Riau.

Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Dengan Ketersediaan Anggaran Sebagai Intervening

Manajemen puncak memegang peranan penting dalam setiap pengambilan keputusan pada tahap siklus pengembangan sistem (*development life cycle*) yang meliputi; perencanaan, perancangan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi sistem. Salah satu bentuk dukungan manajemen adalah menyediakan fasilitas infrastruktur teknologi yang canggih dan memadai, yang mana hal ini akan menjadi faktor keberhasilan pengembangan sistem informasi.

Diterimanya hipotesis penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. Menurut Chenhall dalam Wildoms (2015), dukungan atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Ketersediaan sumber daya yang diperlukan merupakan suatu indikasi dukungan manajemen puncak terhadap proyek pengembangan sistem informasi. Implementasi bisa gagal jika sebagian dari sumber daya kritis (seperti karyawan, dana dan alat-alat) tidak tersedia. Manajemen puncak harus dapat menciptakan suatu kesadaran bahwa keberhasilan implementasi pengembangan sistem informasi akan dapat meningkatkan efektivitas perusahaan.

Dalam hal ini pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi meliputi sumber daya finansial, fisik, SDM, dan kemampuan teknologis dan sistem (Simamora, 2004). Karena sumber-sumber yang dimiliki perusahaan bersifat terbatas, sehingga organisasi atau perusahaan dituntut mampu memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Dari keterangan itu, maka faktor ketersediaan anggaran (*Financial*) menjadi suatu hal yang penting dalam implementasi sistem informasi untuk meningkatkan kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan

tugas untuk mencapai tujuan dan meningkatkan profesionalisme hasil kerja.

Pengaruh Dukungan Legislatif Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Dengan Ketersediaan Anggaran Sebagai Intervening

Peran legislatif dalam mengawal proses penganggaran agar anggaran yang dihasilkan selalu selaras dengan dokumen perencanaan strategik 25 (RPJMD) dan dokumen perencanaan tahunan (SKPD), termasuk dalam penetapan indikator kinerja, sangat penting dalam penerapan sistem informasi perencanaan.

Implementasi sistem informasi perencanaan diharapkan dapat menyelesaikan program kerja dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sehingga program kerja yang dihasilkan mampu menyajikan analisis yang informatif bagi pengguna atau pemangku kepentingan. Rekomendasi Kemendagri kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan e-planning (perencanaan elektronik) adalah agar pemerintah dapat merancang pembangunan daerah dengan baik, terukur dan transparan (Uddin et al., 2018). Masyarakat dapat mengakses dan mengetahui kegiatan pembangunan daerahnya beberapa tahun sebelumnya sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Belum semua situasi di lapangan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Adanya sistem informasi perencanaan akan menghemat penggunaan anggaran khususnya anggaran operasional SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). Implementasi sistem informasi perencanaan dengan ketersediaan anggaran pemerintah daerah harus didukung oleh pihak legislatif sesuai dengan Inpres No 3 tahun 2003 agar pelaksanaan e-planning dapat maksimal dan terintegrasi dengan baik.

Sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD Provinsi mempunyai fungsi : a) Pembentukan Perda Provinsi, b) Anggaran, dan c)

Pengawasan. Dari ketiga fungsi diatas, fungsi yang berkenaan dengan perencanaan adalah fungsi penganggaran. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur. Ketersediaan anggaran untuk operasional maupun peningkatan aplikasi *e-planning* menjadi bagian dalam APBD. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara : a) Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan RKPD, b) Membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi, c) Membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD Provinsi, dan d) Membahas rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi.

Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Dengan Ketersediaan Anggaran Sebagai Intervening

Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan meningkatkan kinerja implementasi sistem informasi perencanaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam implementasi sistem informasi perencanaan dapat menghemat waktu pembuatan perencanaan disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan perencanaan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan perencanaan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan.

Diterimanya hipotesis penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. Seperti penjelasan sebelumnya, suatu sistem sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Desi Indriasari, 2010). Semua potensi

SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia yang merupakan pelaksana implementasi sistem informasi seperti keterampilan dan pengetahuan dengan cara pendidikan dan pelatihan dibutuhkan ketersediaan anggaran yang cukup. Seseorang yang memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya maka ia akan menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya dengan baik dan lebih cepat.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dukungan manajemen puncak berpengaruh signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan di Pemerintah Provinsi Riau. Semakin besar dukungan manajemen puncak yang ditunjukkan oleh pimpinan OPD dalam bentuk perhatian terhadap kinerja sistem informasi perencanaan, indikator ini akan meningkatkan pelaksanaan implementasi sistem informasi perencanaan.
2. Dukungan legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan di Pemerintah Provinsi Riau. Semakin besar dukungan manajemen puncak yang ditunjukkan oleh pimpinan OPD dalam bentuk perhatian terhadap kinerja sistem informasi perencanaan, indikator ini akan meningkatkan pelaksanaan implementasi sistem informasi perencanaan.
3. Sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan yang berarti semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki fungsi perencanaan, maka implementasi perencanaan yang dilaksanakan cenderung semakin baik.
4. Dukungan manajemen puncak melalui ketersediaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan di Pemerintah Provinsi Riau. Semakin besar dukungan manajemen puncak melalui ketersediaan anggaran yang ditunjukkan oleh pimpinan OPD dalam bentuk penyediaan sumber daya yang dibutuhkan (dana dan alat-alat) penunjang sistem informasi perencanaan, indikator ini akan meningkatkan pelaksanaan implementasi sistem informasi perencanaan.
5. Dukungan legislatif melalui ketersediaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan di Pemerintah Provinsi Riau. Semakin besar dukungan legislatif dalam pengalokasian anggaran untuk implementasi sistem informasi perencanaan akan meningkatkan pelaksanaan implementasi sistem informasi perencanaan.
6. Sumber daya manusia melalui ketersediaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi sistem informasi perencanaan yang berarti semakin tinggi ketersediaan anggaran untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki fungsi perencanaan, maka implementasi perencanaan yang dilaksanakan akan semakin baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Aristo, Julian (2017). Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak, Manajemen Proyek dan Keterlibatan Pengguna Terhadap Tingkat Kesuksesan Implementasi Enterprise Resource Planning Pada Perusahaan di Jabodetabek. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*. Vol. 2, No. 2, Juni 2017 : 147-154. ISSN 2527 – 7502
- Bardi, E., Raghunathan, T., & Bagchi, P. (1994). Logistics Information Systems: The Strategic Role of Top Management. *Journal of Business Logistics*, Vol.15, No.1, 71-85
- Chin, W. W. 1998. The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. *Modern Methods for Business Research*, 295, 336
- Cooper, Donald R.& Pamela S.Schindler, 2006, “Business Research Methods”, 9th edition. McGraw-Hill International Edition
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Illir). Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 Juli. Pontianak.
- Ebrahimi M. 2018. Scenario Planning for Technical Knowledge Development. Modeling and Simulation Techniques for Improved Business Processes (pp. 50-74). IGI Global.
- Ghozali Imam, Latan H. 2012. Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko, T. Hani dan Reksohadiprodjo. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perusahaan. Edisi Kedua. BPFE: Yogyakarta
- Iznillah M.Lutfi. 2015. Pengaruh Kualitas SumberDaya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. *JOM FEKON Universitas Riau, Fakultas Ekonomi (Volume 2 Nomor 2)*
- Jogiyanto. 2009. Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk penelitian empiris. BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Yogyakarta
- Komala, A. R. (2012). The Influence of The Accounting Managers' Knowledge and The Top Managements' Support on The Accounting Information System and Its Impact on The Quality of Accounting Information: A Case of Zakat Institutions in Bandung. *Journal of Global Manaement*, Vol.4, No.1
- Kumorotomo,Wahyudi. dan Agus,Subando Margono. (2011). Sistem informasi manajemen dalam organisasi-organisasi publik : Gadjah Mada University Press
- Mahsun, Mohamad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik (3th ed). Yogyakarta: BPFE
- Malayu Hasibuan S.P, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Askara

- Mardiasmo, 2009, Akuntabilitas Sektor Publik, Andi, Yogyakarta
- Mulyadi, Deddy, 2015, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta
- Nouri, H., dan R. J. Parker. 1998. The Relationship Between Budget Participation and Job Performance: The Roles of Budget Adequacy and Organizational Commitment. *Accounting, Organization and Society*, Vol. 23, No. 5/6; 467-483
- O'Brien, 2009, *Introducing to Information System*. New York. McGraw-Hill
- Parulian Hutapea & Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sani et. al. (2017). Strategi Kesiapan Pemerintah Kota Bogor Dalam Penerapan Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planning. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. Volumen 9 Nomor 1, Juni 2017
- Sedarmayanti, M.Pd., APU. 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Penerbit Mandar Maju
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sutrisno. 2012. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: EKONISIA
- Tarigan, Robinson. 2003. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Rajawali Press
- Xiao K. 2018. Managing Subnational Liability For Sustainable Development: A Case Study Of Guangdong Province. In *Fiscal Underpinnings for Sustainable Development in China* (pp. 163-187). Springer, Singapore.